

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu energi merupakan salah satu isu yang intens dibicarakan dalam hubungan internasional kontemporer. Ketahanan energi didefinisikan sebagai ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau. Lebih lanjut, ukuran yang dipakai untuk menilai suatu negara dikatakan memiliki ketahanan energi apabila memiliki pasokan energi untuk 90 hari kebutuhan impor setara minyak.¹ Ketahanan energi dianggap penting karena energi merupakan komponen penting dalam produksi barang dan jasa. Segala bentuk gangguan yang dapat menghambat ketersediaan pasokan energi dalam bentuk bahan bakar primer (BBM, gas dan batubara) maupun kelistrikan dapat menurunkan produktivitas ekonomi suatu wilayah dan jika luasnya gangguan sampai pada tingkat nasional dapat membuat target pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dari yang ditetapkan.²

Keamanan stok BBM Indonesia sendiri berada pada kisaran 22 hari, hanya sedikit lebih baik daripada Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar yang 21 hari.³ Dengan jumlah penduduk yang lebih besar, artinya Indonesia masih jauh untuk bisa mencapai ketahanan energi yang maksimal.

¹ Kemenkeu, "Ketahanan Energi: Konsep, Kebijakan dan Tantangan bagi Indonesia", *Kemenkeu.go.id*, 3 Juli 2014, <http://www.kemenkeu.go.id/en/Kajian/ketahanan-energi-konsep-kebijakan-dan-tantangan-bagi-indonesia>, (diakses 24 Februari 2016).

² *Ibid*

³ Migas Review, "Ketahanan Energi Nasional masih Memperhatikan", *migasreview.com*, 17 Juli 2013, <http://www.migasreview.com/post/1417429597/ketahanan-energi-nasional-masih-memprihatinkan.html>, (diakses 24 Februari 2016).

Sementara itu, Indonesia sedang berkembang menjadi pasar energi yang besar di Asia. Dengan populasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, permintaan energi di dalam negeri yang terus meningkat serta penurunan produksi minyak bumi di dalam negeri telah menggiring Indonesia menjadi pengimpor energi dengan volume yang terus membesar.⁴ Ekonomi akan sulit tumbuh tanpa keamanan pasokan energi yang memadai. Dalam memperbaiki ketahanan energi ke depan, Indonesia harus mengamankan produksi energi dan memanfaatkannya sebesar mungkin untuk kebutuhan dalam negeri, selain itu Indonesia juga perlu mengupayakan agar impor energi itu tidak berkembang cepat.⁵

Seiring dengan pertumbuhan konsumsi energinya, Indonesia menghadapi berbagai tantangan/permasalahan ketahanan energi, yang dapat digambarkan dengan indikator 4A : bagaimana ketersediaan fisiknya (*availability*), bagaimana kemudahan mendapatkannya (*accessibility*), bagaimana keterjangkauan harganya (*affordability*), serta bagaimana/seberapa kualitasnya yang dapat diterima (*acceptability*).⁶ Secara umum ketahanan energi juga digambarkan melalui elemen bauran energi (*energy mix*) serta keberlanjutan (*sustainability*) dari sistem penyediaan-permintaan energi yang ada.⁷ Dalam penelitian ini, fokus kajian berangkat dari permasalahan ketersediaan (*availability*) dan elemen bauran energi (*energy mix*).

⁴ Hanan Nugroho, "Indonesia : Pasar Energi (yang tumbuh cepat) di Asia", *Kompasiana.com*, 20 April 2014, http://www.kompasiana.com/hanannugroho/indonesia-pasar-energi-yang-tumbuh-cepat-di-asia_54f791d7a33311a3738b477b , (diakses 24 Februari 2016).

⁵ *Ibid*

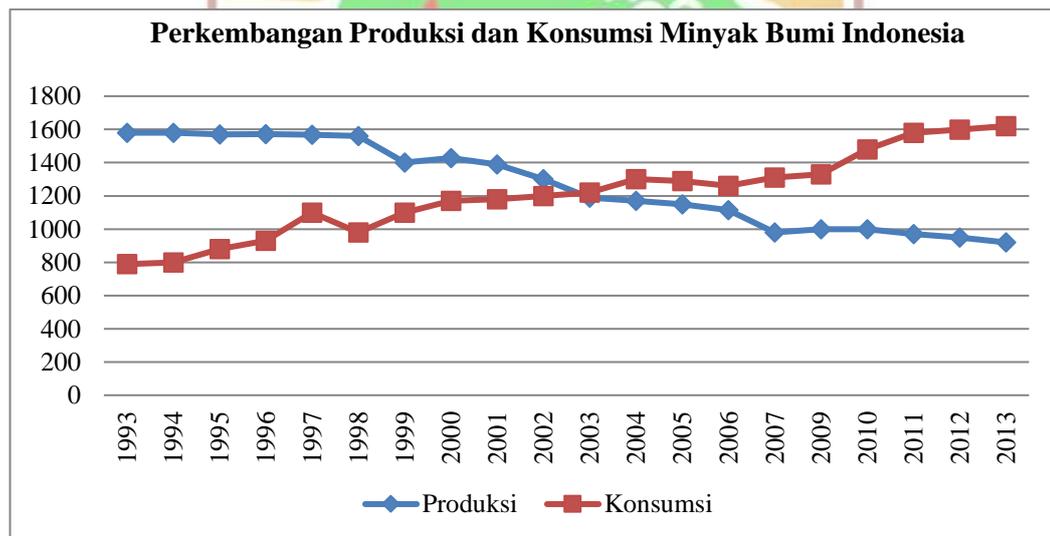
⁶ Tim Ketahanan Energi dan Tim Analisa Kebijakan BAPPENAS, "Memperbaiki Ketahanan Energi Indonesia: Rekomendasi Strategi dan Analisis" (2014), hal.11

⁷ *Ibid*

Bensin adalah komoditas energi yang saat ini Indonesia juga sudah termasuk pengimpor besar di dunia. Impor bensin dan solar terus meningkat, disebabkan oleh melonjaknya konsumsi yang didorong pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor serta harga bensin yang murah karena subsidi pemerintah. Ketergantungan pada bensin sebagai bahan bakar masih sangat besar di Indonesia, terutama di sektor transportasi yang masih merupakan konsumen energi terbesar.⁸

Perkembangan produksi dan konsumsi minyak bumi Indonesia pada gambar 1.1 :

Gambar 1.1 Perkembangan Produksi dan Konsumsi Minyak Bumi



Sumber: Dewan Energi Nasional

Dalam 5 tahun terakhir, produksi rata-rata minyak bumi Indonesia di bawah 1 juta barel per hari (bph). Pada tahun 2010, produksi tersebut 945 ribu

⁸ Hanan Nugroho, "Indonesia : Pasar Energi (yang tumbuh cepat) di Asia", *Kompasiana.com*, 20 April 2014, http://www.kompasiana.com/hannugroho/indonesia-pasar-energi-yang-tumbuh-cepat-di-asia_54f791d7a33311a3738b477b , (diakses 24 Februari 2016).

bph, menurun menjadi 825 ribu bph (2013), dan diperkirakan menurun lagi di tahun berikutnya.⁹

Penurunan produksi minyak disebabkan oleh pengembalian cadangan minyak yang lambat. Pertumbuhan cadangan negatif atau cadangan menurun, oleh karena itu penemuan cadangan tidak bisa cepat, sehingga menyebabkan kapasitas produksi juga menurun.¹⁰

Selain permasalahan minyak bumi, gas dan batubara juga harus menjadi perhatian Indonesia, sebagai energi tak terbarukan yang posisinya sama penting. Menurut Dewan Energi Nasional (DEN), sumber energi dari batubara dan gas masih sangat diperlukan bagi kepentingan negara.¹¹ Karena itu, diperlukannya program jangka panjang mengenai penghentian ekspor di dua sumber komoditas tersebut oleh pemerintah. Ekspor gas Indonesia saat ini sebanyak 50 persen dari total produksi, sedangkan batubara sudah mencapai 80 persen, padahal kebutuhan dua energi primer tersebut dibutuhkan untuk pembangkit listrik di dalam negeri.¹²

Ketergantungan energi fosil masih didominasi oleh kebutuhan minyak yang mencapai 41,8 persen, kemudian batu bara 29 persen dan gas 23 persen.¹³ Kebutuhan ini untuk memenuhi sektor industri yang mendominasi sebesar 37

⁹ Dewan Energi Nasional (DEN), “Statistik”, *den.go.id*, http://statistik.den.go.id/result/index?category_id=12&sub_category_id=14&year=2014, (diakses 26 Februari 2016).

¹⁰ Sapto Andika, “Produksi Nasional Minyak Terus Menurun”, *republika.co.id*, 22 Februari 2016, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/02/22/o2y4yu382-produksi-minyak-nasional-terus-menurun>, (diakses 26 Februari 2016).

¹¹ Novrizal Sikumbang, “Cadangan Menipis, DEN Desak Pemerintah Stop Ekspor Sumber Energi Ini” , *aktual.com*, 29 November 2015, <http://www.aktual.com/cadangan-menipis-den-desak-pemerintah-stop-ekspor-sumber-energi-ini/> , (diakses 26 Februari 2016).

¹² *Ibid*

¹³ Gaya Lufityanti, “Cadangan Minyak di Indonesia Hanya Cukup untuk 23 Tahun Lagi”, *tribunnews.com*, 14 September 2014, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/09/14/cadangan-minyak-di-indonesia-hanya-cukup-untuk-23-tahun-lagi> , (diakses 26 Februari 2016).

persen penggunaan energi fosil di Indonesia. Kebutuhan yang sangat besar ini ternyata tidak bisa ditopang oleh cadangan energi di Indonesia yang terus menipis. Cadangan minyak misalnya, hanya cukup untuk 23 tahun lagi, sementara cadangan gas masih cukup sampai 50 tahun ke depan dan batu bara cukup untuk 80 tahun mendatang.¹⁴

Dari segi ketersediaan (*availability*) energi, permasalahan yang dihadapi Indonesia seperti: produksi minyak bumi terus menurun, rasio penemuan cadangan/produksi rendah, ketergantungan impor energi membesar, proposi batubara yang diekspor terlalu besar, besarnya proposi ekspor LNG dan gas bumi serta masih lamanya keterikatan pada kontrak-kontrak ekspor jangka panjang.¹⁵

Selanjutnya dari sisi bauran energi, tantangan yang besar muncul dari masih tingginya ketergantungan pada bahan bakar fosil (khususnya minyak bumi), yang berarti pangsa pemanfaatan energi terbarukan yang masih rendah. Ketergantungan berlebihan pada bahan bakar fosil juga menimbulkan pertanyaan pada aspek keberlanjutan (*sustainability*) dari sistem pemanfaatan energi yang diterapkan di Indonesia.¹⁶

Dalam UU No. 30 tahun 2007 menyatakan bahwa energi memiliki peranan yang sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan keamanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahananya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan,

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Tim Ketahanan Energi dan Tim Analisa Kebijakan BAPPENAS, “Memperbaiki Ketahanan Energi Indonesia: Rekomendasi Strategi dan Analisis”, (2014), hal.11

¹⁶ *Ibid*, hal.12

optimal, dan terpadu.¹⁷ Bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganeekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin.¹⁸

Konsep energi baru dan terbarukan perlu dibedakan, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2007 tentang energi, energi baru adalah energi yang di hasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan. Contoh : *Coal Bed Methane (CBM)*, *liqued coal*, *gasified coal*, *hydrogen* dan nuklir. Sedangkan energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Contoh: panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.¹⁹

Berdasarkan Perpres No. 5 Tahun 2006, arah Kebijakan Energi Nasional (KEN) Indonesia mulai mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan mengembangkan energi terbarukan sebagai bauran energi (*energy mix*).²⁰ Perubahan bauran energi pada rumusan KEN yang sedang dalam proses penyempurnaan tersebut yaitu, mengubah pemakaian bahan bakar minyak (BBM) dari sebelumnya hampir 50 persen pada tahun 2006 menjadi 20 persen pada tahun 2025, pemakaian gas bumi dari sekitar 26 persen menjadi 27 persen, batubara dari sebelumnya 15 persen ditingkatkan menjadi 30 persen dan penggunaan energi

¹⁷ Kementerian ESDM, “Undang-undang no. 30 tahun 2007”, *esdm.go.id*, 10 Agustus 2007, <http://prokum.esdm.go.id/uu/2007/uu-30-2007.pdf>, (diakses 20 Juni 2016)

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Purnomo Yusgiantoro, “Optimalisasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT) Untuk Menjamin Ketahanan Energi Nasional”, *unpad.ac.id*, <http://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Optimalisasi-Pengelolaan-energi-Baru-Terbarukan-untuk-Menjamin-Ketahanan-Energi-Nasional.pdf>. (diakses 20 juni 2016)

²⁰ Kementerian ESDM, “Dewan Energi Nasional Rubah Komposisi Bauran Energi Nasional”, *esdm.go.id*, 24 Juni 2010, <http://www.esdm.go.id/index.php/post/view/dewan-energi-nasional-rubah-komposisi-bauran-energi-nasional>, (diakses 15 Maret 2016).

baru terbarukan akan terus ditingkatkan pemanfaatannya menjadi 17 persen pada tahun 2025.²¹

Indonesia memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang cukup besar diantaranya, mini/micro hydro sebesar 450 MW, Biomass 50 GW, energi surya 4,80 kWh/m²/hari, energi angin 3-6 m/det dan energi nuklir 3 GW. Saat ini pengembangan EBT mengacu kepada Perpres No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.²² Dalam Perpres disebutkan kontribusi EBT dalam bauran energi primer nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 17% dengan komposisi bahan bakar nabati sebesar (5%), panas bumi (5%), biomasa, nuklir, air, surya, dan angin (5%), serta batubara yang dicairkan sebesar (2%).²³

Dalam mewujudkan KEN dan mengatasi permasalahan energinya, Indonesia menjalin kerjasama dengan *International Energy Agency* (IEA). IEA merupakan sebuah badan yang berdiri dalam kerangka Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)²⁴, didirikan pada bulan November tahun 1974 untuk melaksanakan program energi internasional.²⁵ IEA didirikan untuk mengoperasikan suatu sistem informasi permanen mengenai perdagangan minyak dunia. Tujuan dasar pendirian IEA di antaranya, untuk mengelola dan memperbaiki sistem penanggulangan terjadinya gangguan pasokan minyak. IEA juga bertujuan mempromosikan kebijakan-kebijakan energi yang rasional di

²¹ *Ibid*

²² Kementerian ESDM, "Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) Indonesia", *esdm.go.id*, 25 Agustus 2008, <http://www2.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/1962-potensi-energi-baru-terbarukan-ebt-indonesia.pdf>, (diakses 1 April 2016).

²³ *Ibid*

²⁴ OECD merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas.

²⁵ Kementerian ESDM, "Sekilas Tentang International Energy Agency (IEA)", *esdm.go.id*, 28 April 2009, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/sekilas-tentang-international-energy-agency-iea>, (diakses 10 April 2016)

dalam konteks global, melalui hubungan kerjasama dengan negara-negara bukan anggota, industri dan organisasi internasional.²⁶

IEA bertanggung jawab terhadap perbaikan struktur pasokan dan pemakaian energi dunia dengan mengembangkan sumber-sumber energi alternatif serta meningkatkan penghematan energi. IEA juga menjalankan promosi kerjasama internasional mengenai teknologi energi dan membantu dalam penggabungan antara kebijakan lingkungan dengan kebijakan energi.²⁷ IEA mempromosikan ketahanan energi diantara negara-negara anggotanya melalui tanggapan kolektif hingga gangguan fisik dalam pengadaan minyak, dan menyediakan riset yang bersifat autoritatif dan analisa terhadap cara-cara untuk memastikan energi yang bisa diandalkan, terjangkau, dan bersih bagi 29 negara anggotanya dan negara-negara lainnya.²⁸

Dialog antara Indonesia dengan IEA dimulai pada tahun 2006. Satu tim khusus dibawah koordinasi IEA telah melakukan analisis atas kebijakan energi pemerintah, dimana hasilnya telah dimuat dalam “*The IEA Energy Policy Review of Indonesia 2008*”.²⁹ Laporan ini memfokuskan pada enam sektor yang harus diprioritaskan oleh pemerintah, yakni pengurangan subsidi BBM dan listrik secara progresif serta transparan, memastikan kebijakan energi telah diimplementasikan dengan baik, memperbaiki kerangka kerja investasi, membantu para pengawas sektor energi dalam pelaksanaan tugasnya dan membentuk program

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ IEA, “Indonesia 2015 (Ringkasan Pelaksanaan)”, *iea.org*, http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2015/Indonesia2015SUM_bahasa.pdf. (diakses 23 Januari 2017)

²⁹ Kementerian ESDM, “Indonesia dan IEA Tingkatkan Kerjasama”, *esdm.go.id*, 18 Juni 2009, <http://www.esdm.go.id/index.php/post/view/indonesia-dan-iea-tingkatkan-kerjasama>, (diakses 13 April 2016).

pengembangan energi yang berkelanjutan, terutama yang terkait dengan energi terbarukan dan efisiensi energi.³⁰

Laporan tersebut juga memberi apresiasi terhadap pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN) yang dinilai sebagai suatu langkah penting dalam mengawasi perubahan kebijakan energi. Pihak pemerintah Indonesia dan IEA mengharapkan bahwa persetujuan kerjasama ini menjadi langkah yang positif dalam rangka kerjasama bilateral melalui pertukaran informasi dan data secara dua arah, sehingga dapat membantu pengembangan kebijakan energi di Indonesia di masa yang akan datang.³¹

Pada tahun 2009 pemerintah Indonesia dan International Energy Agency telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama untuk mengatasi berbagai tantangan energi global. Pemerintah Indonesia telah menyetujui kerjasama dengan IEA yang difokuskan pada : optimalisasi *energy mix*, termasuk energi terbarukan, dan kesiapan sektor migas dalam menghadapi keadaan yang tidak terduga, efisiensi energi, perubahan iklim, penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengembangan energi, serta informasi dan statistik energi. Kedua belah pihak telah menyetujui untuk berkerjasama dalam melaksanakan beberapa kegiatan bersama, antara lain peninjauan dan analisis berbagai kebijakan, dan partisipasi para perwakilan Indonesia dalam beberapa forum IEA.³²

Indonesia ditetapkan menjadi anggota resmi sebagai *associate member* dari Lembaga Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) di Paris, dalam pertemuan menteri-menteri energi sedunia pada 17-18 November

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

2015.³³ Indonesia masuk ke dalam kelompok yang disebut sebagai *associate member* bersama dengan China, Meksiko, dan Chili. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menjelaskan, tujuan utama Indonesia bergabung dalam *IEA* adalah untuk menjamin pasokan energi nasional dengan menjalin kemitraan secara internasional.³⁴

Manfaat lainnya bergabung dengan *IEA*, adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan hubungan bilateral dengan negara-negara maju pengembang teknologi penghasil energi terbarukan. Negara-negara anggota *IEA* sebelumnya adalah: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Ceko, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Jepang, Korea, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugis, Slowakia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, dan Amerika. Dalam pelaksanaannya, Komisi Eropa juga berpartisipasi dalam pekerjaan *IEA*.³⁵

Sudut pandang liberal dalam kajian Hubungan Internasional, menekankan arti penting kerjasama. Asumsi-asumsi dasar liberalisme terdiri atas pandangan positif tentang sifat manusia, keyakinan hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual, dan percaya terhadap kemajuan.³⁶ Dari asumsi tersebut negara-negara cenderung menjauhi konflik dan melakukan pendekatan kerjasama dalam menghadapi suatu permasalahan. Adanya institusi internasional dapat memajukan dan mempermudah kerjasama antar negara, institusi

³³ Kementerian ESDM, "Indonesia Resmi Gabung Di IEA", *esdm.go.id*, 20 November 2015, <http://ebtke.esdm.go.id/post/2015/11/20/1020/indonesia.resmi.gabung.di.ia>, (diakses 18 April 2016).

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations*, (New York: Oxford University Press Inc, 1999), Terjemahan Dadan Suryadipura, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 141-142

internasional dibuat dalam rangka tujuan menampung kepentingan-kepentingan setiap negara.³⁷ Hal ini akan membantu negara-negara dalam menyelesaikan permasalahan dan isu-isu tertentu secara lebih spesifik.

Energi merupakan faktor penting dalam perekonomian, kesejahteraan rakyat, juga keberlangsungan suatu negara, sehingga ketersediannya harus terus dijaga. Untuk itu, penelitian ini menjadikan kerjasama sebagai fokus utama. IEA merupakan intitusi internasional yang bergerak di bidang energi. Tujuan Indonesia sendiri menjalin kerjasama dengan IEA adalah agar dapat membantu Indonesia dalam menghadapi permasalahan energi, salah satunya optimalisasi *energy mix* yang erat kaitannya dengan ketersediaan energi di masa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Saat ini Indonesia masih belum bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap energi yang berasal dari fosil (migas dan batubara), sehingga dapat dipastikan bahwa struktur dan sistem ketahanan energi sangat bergantung kepada energi tidak terbarukan. Keamanan pasokan energi semakin penting, mengingat adanya peningkatan konsumsi energi di Indonesia, ketersediaan energi yang semakin terbatas (*scarcity of energy supplies*) dan kecenderungan harga energi yang semakin naik. Kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat, belum diikuti oleh regulasi dan pemanfaatan energi yang maksimal. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengamankan cadangan energi di masa yang akan datang.

³⁷ *Ibid*, hal. 154

Menjalin kerjasama dengan IEA merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan energi, hal ini bertujuan untuk menjamin pasokan energi nasional dengan menjalin kemitraan secara internasional, juga meningkatkan pengetahuan, informasi dan hubungan bilateral dengan negara-negara maju dalam kebijakan, analisis, pengembangan teknologi energi, dll. Oleh sebab itu, penting untuk melihat sejauh mana kontribusi dan pengaruh kerjasama Indonesia – IEA terhadap optimalisasi *energy mix* di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, pertanyaan yang nantinya akan diangkat melalui penelitian ini yaitu:

“Bagaimana pengaruh kerjasama Indonesia – IEA terhadap optimalisasi energy mix di Indonesia”?

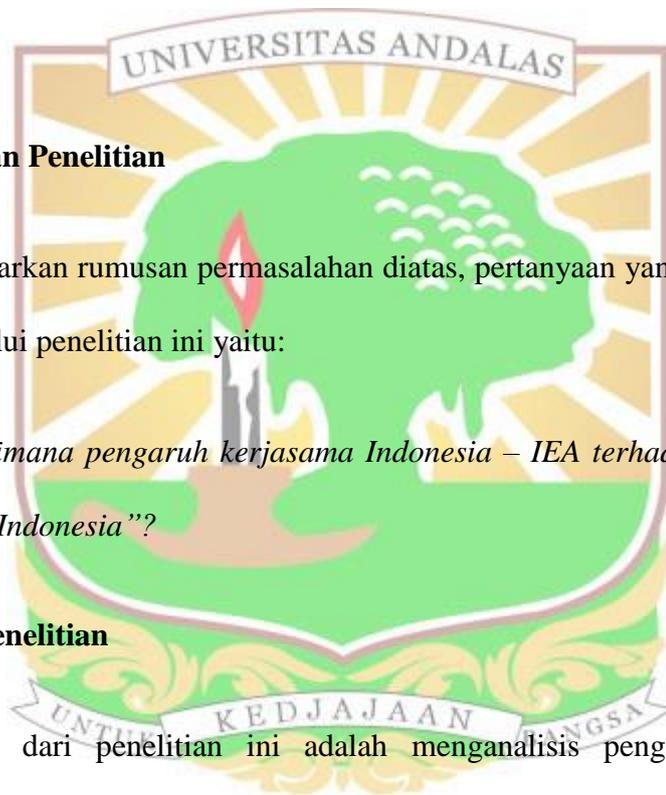
1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kerjasama Indonesia - IEA terhadap optimalisasi *energy mix* di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Menambah referensi tentang Studi Hubungan Internasional dan memperkaya pemahaman tentang kerjasama dan energi.



2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional serta penelitian masalah-masalah internasional yang berhubungan dengan kerjasama, kebijakan energi dan *energy mix*.
3. Sebagai bahan Pembelajaran.

1.6 Studi Pustaka

Tinjauan studi pustaka dilakukan guna menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Beberapa penelitian sebelumnya akan menjadi tolak ukur dan pijakan bagi peneliti dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian. Secara umum, penelitian mengenai ketahanan energi telah dibahas dan tertuang dalam bentuk karya ilmiah, baik buku, tugas akhir maupun jurnal ilmiah.

Pertama, peneliti merujuk pada jurnal karya Lirong Wang yang berjudul *Sea Lanes and Chinese National Energy Security*.³⁸ Tulisan ini menjelaskan bahwa energi merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional. Permasalahan seperti kekurangan atau gangguan dalam pasokan energi, akan langsung mengancam keamanan ekonomi nasional. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi nasional China, terutama meningkatnya ketergantungan energi pada transportasi laut, maka keamanan jalur laut secara bertahap menjadi isu strategis dalam keamanan dan pembangunan nasional.

Saat ini, lebih dari 90% pasokan energi impor nasional tergantung pada transportasi jalur laut. Dengan demikian, jalur laut ini menjadi "nadi" untuk

³⁸ Lirong Wang, "Sea lanes and Chinese national energy security". In: Mi, W.; Lee, L.H.; Hirasawa, K., and Li, W.(eds.), *Recent Developments on Port and Ocean Engineering*. Journal of Coastal Research, Special Issue, No. 73, Coconut Creek (Florida, 2015)

mempertahankan nasional ekonomi. Dalam upaya untuk menjaga ketahanan energi China, pemerintah harus memperkuat dan melakukan perencanaan dengan sebaik-baiknya. Mengembangkan strategi keamanan nasional secepat mungkin, meningkatkan kemampuan komprehensif dalam menjaga keamanan jalur laut, berpartisipasi dalam kerjasama internasional jalur strategis kelautan, menjelajahi jalur baru untuk bisnis dan transportasi energi, dan mengurangi risiko dalam transportasi dan ekonomi.³⁹

Perbedaan Penelitian ini dengan *Sea Lanes and Chinese National Energy Security* adalah penelitian tersebut memfokuskan bahasan pada upaya pemerintah China dalam menjaga ketahanan energi melalui pengamanan transportasi jalur laut, dimana lebih dari 90% pasokan energi China tergantung pada transportasi jalur laut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada kerjasama Indonesia – IEA terhadap optimalisasi *energy mix* di Indonesia.

Kedua, peneliti merujuk jurnal dari Marcus DuBois King & Jay Gullede yang berjudul *The Climate Change and Energy Security Nexus*.⁴⁰ Tulisan ini memaparkan bahwa dampak fisik secara langsung dari perubahan iklim, seperti peningkatan frekuensi dan intensitas badai, gelombang panas, serta kekeringan akan berimbas kepada ketahanan energi melalui beberapa kondisi. Isu-isu seperti jalur perhubungan laut, ketahanan energi dan jaringan listrik terus berkembang dan menjadi perhatian dalam banyak literatur, ini menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan sangat berfokus pada permasalahan ini.⁴¹

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Marcus DuBois King & Jay Gullede, “The Climate Change and Energy Security Nexus” ,vol.37:2 (summer 2013).

⁴¹ *Ibid*

Kebijakan yang dirancang untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan mendukung ketahanan energi, bisa saling memperkuat dan menguntungkan. konservasi energi digambarkan sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan ketahanan energi sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim di beberapa negara. Dari banyak kasus, kebijakan dalam mengurangi permintaan energi, terutama minyak dapat dilakukan melalui beberapa inovasi teknologi, namun membutuhkan efisiensi energi yang lebih besar dan mungkin dapat mengatasi kedua tantangan sekaligus. Di sisi lain kebijakan dalam mengurangi perubahan iklim tersebut mungkin memerlukan implementasi dan rentang waktu yang berbeda-beda, selain itu di perlukan biaya yang tidak sedikit.⁴²

Perbedaan Penelitian ini dengan *The Climate Change and Energy Security Nexus* adalah fokus bahasan, dimana jurnal ini memfokuskan bahasan pada dampak perubahan iklim yang dapat berimbas pada ketahanan energi, serta pentingnya pengembangan energi terbarukan dengan inovasi teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi perubahan iklim, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada kerjasama Indonesia – IEA terhadap optimalisasi *energy mix* di Indonesia.

Ketiga, peneliti merujuk pada jurnal yang berjudul *European Energy Security Challenges and Global Energy Trends: Old Wine in New Bottles?* Yang di tulis oleh Marie-Claire Aoun.⁴³ Tulisan ini memaparkan tentang Komisi Eropa yang mulai mengangkat isu pada tahun 2000, tentang meningkatnya kekhawatiran terhadap ketergantungan energi di Uni Eropa setelah kenaikan harga minyak

⁴² *Ibid*

⁴³ Marie-Claire Aoun, “European Energy Security Challenges and Global Energy Trends: Old Wine in New Bottles?”, (*IAI-OCP Policy Center*, 2015)

mentah. Hal Ini menuntut mereka untuk merancang sebuah strategi energi jangka panjang di Uni Eropa yang bertujuan untuk mengurangi risiko ketergantungan tersebut, salah satunya melalui konsumsi, pengelolaan dan pengembangan energi terbarukan yang lebih baik, serta menjalin kerjasama dengan negara penghasil energi. Pada saat itu, di samping energi terbarukan, gas alam dipandang sebagai alternatif yang menjanjikan.⁴⁴

Uni Eropa merancang strategi jangka panjang, salah satunya dengan cara membangun kemitraan yang baik dengan negara-negara penghasil energi, serta yang memiliki potensi energi. Rusia, Kaspia (*Southern Corridor*: Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan dan Azerbaijan), dan mediteran (negara di timur mediteran hingga Afrika utara) merupakan mitra yang penting bagi Uni Eropa dalam menjalin kemitraan dibidang energi. ini juga dianggap sebagai langkah penting bagi Uni Eropa dalam mengamankan pasokan energi. Kebijakan ketahanan energi Uni Eropa memperhatikan semua aspek. Kebijakan bauran energi Uni Eropa didasarkan pada intensifikasi efisiensi energi (dengan target 20 persen pada tahun 2020) dengan mengembangkan energi terbarukan (rancangan kebijakan Iklim dan Energi).⁴⁵

Perbedaan Penelitian ini dengan *European Energy Security Challenges and Global Energy Trends: Old Wine in New Bottles?* adalah jurnal ini memfokuskan bahasan pada Uni Eropa yang mencari sumber energi alternatif, setelah kenaikan harga minyak mentah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap minyak. Uni Eropa membangun kemitraan dengan negara-negara

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

penghasil energi seperti Rusia, wilayah kaspia, dan kawasan mediteran yang dianggap sebagai langkah penting dalam mengamankan pasokan energi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada kerjasama Indonesia – IEA terhadap optimalisasi *energy mix* di Indonesia.

*Keempat, dalam jurnal Muhammad Faris Alfadh yang berjudul Kebijakan Ketahanan Energi Jepang Di Abad 21: Fundamentalisme Negara Dan Diversifikasi Sumber Energi,*⁴⁶ dijelaskan bahwa ketahanan energi akan selalu menjadi agenda prioritas tersendiri dalam politik luar negeri Jepang. Hal ini tidak terelakkan, mengingat untuk mendukung industrialisasi dan kemajuan ekonomi, Jepang memerlukan pasokan energi dalam jumlah besar, sementara sumber energi dalam negeri sangat terbatas. Karena itu, kebijakan untuk memastikan stabilitas pasokan energi dari luar negeri menjadi penting bagi para pengambil kebijakan Jepang.⁴⁷

Dalam menjalankan kebijakan ketahanan energinya, pada tahun 2002 Perdana Menteri Jepang Koizumi, mengutus wakil menteri luar negeri, Sugiura, untuk memimpin misi “*Silk Road Energy Mission*” ke Kazakstan, Uzbekistan, Azerbaijan, dan Turkmenistan, untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah potensial yang bisa diajak kerjasama. Inisiatif tersebut kemudian dilanjutkan dengan diadakannya dialog di tahun 2004 yang digagas Jepang untuk menciptakan stabilitas dan pembangunan di kawasan Asia Tengah. Kunjungan

⁴⁶ *Muhammad Faris Alfadh*, “Kebijakan Ketahanan Energi Jepang Di Abad 21: Fundamentalisme Negara Dan Diversifikasi Sumber Energi”, (Jurnal Studi Hubungan Internasional, Vol. 2, No. 2, 2012)

⁴⁷ *Ibid*

Koizumi di tahun 2006 semakin memperjelas tujuan Jepang, yaitu kebutuhan akan sumber energi.⁴⁸

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan jurnal *Kebijakan Ketahanan Energi Jepang Di Abad 21: Fundamentalisme Negara Dan Diversifikasi Sumber Energi* adalah, Jepang melalui kebijakan ketahanan energinya, mencari negara atau wilayah yang dianggap potensial dalam menjalankan kerjasama energi, melalui misi dan program-program di wilayah tersebut, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, lebih berfokus kepada kerjasama Indonesia – IEA terhadap optimalisasi *energy mix* di Indonesia.

Kemudian yang terakhir, dalam tulisan Gawdat Bahgat yang berjudul *Israel's energy security: the Caspian Sea and the Middle East*,⁴⁹ tulisan ini menjelaskan, Israel sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang maju di Timur Tengah, karenanya dibutuhkan sumber daya energi yang berkelanjutan dan terjangkau untuk mempertahankan standar hidup yang tinggi. Namun karena hambatan geologi dan geopolitik, mencapai ketahanan energi Israel adalah hal yang penuh tantangan. Sumber daya alam yang terbatas memaksa Israel untuk tergantung pada pasokan luar. Israel berada di samping negara yang memiliki minyak dan gas terkaya di dunia. Namun konflik Israel-Arab telah menghalangi Israel melakukan kerjasama energi secara alamiah.⁵⁰

Israel mengimpor energi dari Rusia, Meksiko, Afrika. Dalam dua dekade, Azerbaijan dan Kazakhstan juga menjadi pemasok utama energi Israel. Kerjasama energi menjadi hal yang sangat krusial bagi Israel. Pertama, kerjasama energi

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Gawdat Bahgat, "Israel energy security: the Caspian Sea and the Middle East", *Near East South Asia Center for Strategic Studies*, (National Defense University, Washington, D.C, 2010)

⁵⁰ *Ibid*

mencerminkan hubungan strategis yang kuat. Perdagangan energi tidak dapat dipisahkan dari konteks geopolitik yang luas. Kedua, perang selama ini diartikan dari segi *zero-sum*, yaitu adanya kemenangan di pihak yang satu, dan kekalahan di pihak yang lain.⁵¹

Namun tidak demikian dengan kerjasama energi, yang mengutamakan *win-win solution*. Karena itu, kemitraan dalam kerjasama energi seharusnya tidak dilihat sebagai pengganti yang lain. Dalam konteks Israel, kerjasama dengan Azerbaijan dan Kazakhstan kemungkinan untuk lebih meningkatkan ketahanan energi, namun Israel harus mengeksplorasi cara-cara untuk memulai dan memperluas kemitraan energi dengan tetangganya dengan situasi politik yang tepat.⁵²

Perbedaan Penelitian ini dengan jurnal *Israel's energy security: the Caspian Sea and the Middle East* adalah jurnal ini membahas situasi geologi dan geopolitik yang mempersulit Israel dalam menciptakan ketahanan energi, keterbatasan sumber daya alam membuat Israel bergantung pada pasokan energi dari luar. Konflik Arab-Israel membuat Israel harus lebih berusaha dalam mencari pasokan, padahal mereka berada di tengah-tengah wilayah yang paling kaya energi. Israel mencari negara-negara pemasok energi, seperti Rusia, Meksiko, Afrika, Azerbaijan dan Kazakhstan untuk menciptakan ketahanan energi mereka, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, berfokus kepada pengaruh kerjasama Indonesia – IEA terhadap optimalisasi *energy mix* di Indonesia.

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Kerjasama Internasional

Saat ini, sebagian besar transaksi dan interaksi antar negara dalam sistem Internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, ataupun global yang bermunculan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Proses seperti ini biasa disebut kerjasama atau kooperasi.

Kalevi Jaakko Holsti dalam bukunya *Politik Internasional: kerangka untuk analisis*, mengemukakan.⁵³

Kerjasama Internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut, mencari kenyataan-kenyataan teknis (faktor-faktor) yang mendukung jalan keluar tertentu dan mengadakan pereundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak.

Untuk lebih rincinya, K.J. Holsti mendefinisikan kerjasama internasional sebagai berikut:⁵⁴

- a) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.

⁵³ K.J Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari, (Jakarta: Erlangga, 1988), hal. 65

⁵⁴ *Ibid*, hal. 652-653

- b) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Menurut Dougherty & Pfaltzgraff kerjasama dapat didefinisikan sebagai:⁵⁵

serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.

Diskusi kerjasama internasional secara teori meliputi hubungan antara dua negara atau hubungan antara unit-unit yang lebih besar disebut juga dengan multilateralisme. Walaupun bentuk kerjasama seringkali dimulai diantara dua negara, namun fokus utama dari kerjasama internasional adalah kerjasama multilateral. Multilateralisme didefinisikan oleh John Ruggie sebagai bentuk institusional yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum yang dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi termasuk didalamnya organisasi internasional, rezim

⁵⁵ James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theories*, (New York: Harper and Row Publisher, 1997), hal. 418-419

internasional, dan fenomena yang belum nyata terjadi, yakni keteraturan internasional.⁵⁶

Institusi internasional memiliki beberapa peran penting. Robert Keohane menyatakan bahwa peran institusi adalah:⁵⁷

- a) Menyediakan aliran informasi dan kesempatan bernegosiasi.
- b) Meningkatkan kemampuan pemerintah memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri, oleh karena itu kemampuannya membuat komitmen yang dapat dipercaya berada di urutan pertama.
- c) Memperkuat harapan (level ekspekasi) yang muncul tentang kesolidan dari kesepaktan internasional.

Kerjasama internasional itu sendiri terbagi atas empat bentuk, antara lain:⁵⁸

- a) Kerjasama Global

Kerjasama yang memadukan semua bangsa di dunia dan mempersatukan seluruh cita-cita bersama serta untuk menghindarkan disintegrasi internasional.

- b) Kerjasama Regional

⁵⁶ *Ibid*, hal. 420

⁵⁷ Robert O. Keohane, *International Institutions and State Power (Essay in International Relations Theory)*, (London: Westvie Press, 1989), hal. 2

⁵⁸ Teuku May Rudy, *Organisasi dan Administrasi Internasional*, (Bandung: PT. Eresco, 1993), hal. 6

Kerjasama antara negara-negara yang secara geografis berdekatan dan memiliki kesamaan pandangan ekonomi, politik, sosial, budaya dari negara-negara yang hendak bekerjasama tersebut.

c) Kerjasama Fungsional

Kerjasama yang didasarkan pada fungsinya masing-masing, biasanya kerjasama ini meningkatkan bidang-bidang tertentu, misalnya: ekonomi, politik sosial budaya, dan lingkungan hidup.

d) Kerjasama Ideologis

Kerjasama yang dilakukan negara-negara yang menganut paham ideologi yang sama, dan bentuk kerjasama biasanya diberlakukan melalui suatu perjanjian.

Berdasarkan definisi dan jenis kerjasama internasional di atas, kerjasama yang dilakukan Indonesia dan IEA merupakan suatu kerjasama internasional yang termasuk dalam bentuk kerjasama fungsional, kerjasama yang dilakukan dalam bidang-bidang tertentu, yaitu bidang energi.

Menurut K.J. Holsti, ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:⁵⁹

a) Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, dimana melalui kerjasama dengan negara lainnya, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.

b) Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.

⁵⁹ K.J.Holsti, *International Politic : A Framework For Analisis*, (Englewood Cliffs: Prentice Hall International Inc, 1995), hal. 362-363

- c) Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
- d) Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Kerjasama terbagi atas tiga tingkatan, antara lain:⁶⁰

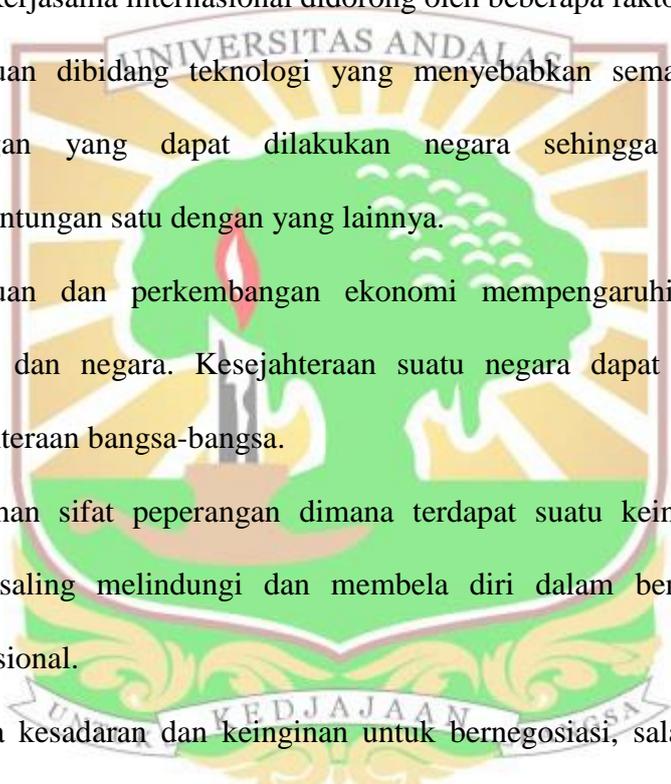
- a) Konsensus, yaitu suatu tingkat kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat tersebut.
- b) Kolaborasi, yaitu suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus. Ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, yang ditandai pula oleh saling keterlibatan yang aktif diantara negara-negara yang terlibat. Keuntungan didapat dalam kolaborasi ini dinilai pula sebagai hasil kerjasama.
- c) Integrasi, Kerjasama ini ditandai oleh tingkat kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat didalamnya. Dalam kerjasama ini hampir mustahil pula ditemukan kepentingan yang berbenturan diantara negara-negara yang terlibat.

Dari tingkatan kerjasama diatas, kerjasama Indonesia – IEA dapat dikategorikan dalam tingkat kolaborasi, ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, yang dalam hal ini adalah mengatasi permasalahan energi. Keterlibatan aktif ditandai dengan kesepakatan pemerintah Indonesia dan IEA untuk meningkatkan kerjasama yang diawali sejak tahun 2006, dan beberapa tahapan-tahapan penting, juga kegiatan-kegiatan bersama yang telah dilakukan.

⁶⁰ Brian Hocking and Michael Smith, *World Politics: An Introduction to International Relations*, (London: Harvester Wheatsheaf, 1990), hal. 222

Disamping itu, kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.⁶¹

Suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor:⁶²

- 
- a) Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
 - b) Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa.
 - c) Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.
 - d) Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

Mencermati tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya

⁶¹ Koesnadi Kartasasmita, *Administrasi Internasional*, (Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 1997), hal. 19

⁶² *Ibid*

di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara.⁶³

Kerjasama internasional dilakukan sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama, yaitu pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari pada komitmen.⁶⁴

Robert O Keohane dan Joseph S Nye, dalam *Transnationalism Relations and World Politics*, menjelaskan hubungan transnasional berkaitan erat dengan interdependensi dan pentingnya peran institusi internasional dalam masalah nasional maupun internasional.⁶⁵ Aktor transnasional dimaknai sebagai individu atau kelompok secara lintas negara yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam bidang tertentu.⁶⁶

Nye dan Keohane melihat aktor non-negara mempunyai peluang yang besar untuk berperan secara langsung dalam politik internasional, dan menjadi penting tidak hanya dalam kaitannya dengan aktivitas mereka dalam mengejar kepentingan mereka tetapi juga dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah suatu

⁶³ Sjamsumar Dam dan Riswandi, *Kerjasama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hal. 15

⁶⁴ *Ibid*, hal.16

⁶⁵ Robert O. Keohane dan Joseph Nye, "Transnational Relations and World Politics", dalam Evan Luard, *Basic Text in International Relations*, (London: Palgrave Macmillan, 1992)

⁶⁶ Sidney Tarrow, *The New Transnational Activism*, (New York: Cambridge University Press, 2005)

negara menjadi lebih sensitif terhadap negara yang lainnya.⁶⁷ Menurut Huntington, suatu organisasi transnasional bisa berupa organisasi pemerintah maupun non-pemerintah.⁶⁸ Jika organisasi transnasional bisa berupa organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, maka aktivitas transnasional bisa juga dilakukan baik oleh aktor negara maupun non-negara.

Menurut Keohane dan Nye, negara sebagai aktor utama yang memiliki kemampuan dalam mencapai tujuan. Kemudian munculah suatu kondisi interaksi yang melibatkan para aktor internasional. Keberhasilan interaksi ini dipengaruhi juga oleh keadaan geografis, kebijakan domestik negara itu sendiri serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶⁹ Interaksi serta organisasi transnasional membawa lima dampak utama secara langsung maupun tidak langsung bagi hubungan internasional dan politik antar negara. Kelima dampak tersebut adalah: (1) perubahan perilaku, (2) pluralisme internasional, (3) meningkatnya hubungan dependensi dan interdependensi antar negara, (4) meningkatnya kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain, dan (5) munculnya *autonomous actor* dalam menentukan kebijakan luar negeri.⁷⁰

1. Perubahan Perilaku

Interaksi transnasional memungkinkan adanya perubahan perilaku. Hal ini dapat terjadi melalui hubungan tatap muka, komunikasi maupun transportasi transnasional, travel dan finance. Selain itu adanya organisasi

⁶⁷ Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, *Transnational Relations and World Politics*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hal. 26

⁶⁸ Samuel P. Huntington & Nelson, Joan, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), hal. 335

⁶⁹ Robert O. Keohane dan Joseph Nye, "Transnational Relations and World Politics", dalam Evan Luard, *Basic Text in International Relations*, (London: Palgrave Macmillan, 1992), hal. 552-553

⁷⁰ *Ibid*

transnasional juga dapat berperan dalam perubahan perilaku. Karena untuk mengukuhkan eksistensinya, mereka tentunya telah membuat pedoman, simbol dan norma baru yang kemudian harus ditaati.⁷¹

2. Pluralisme Internasional

Dengan adanya hubungan transnasional maka akan timbul hubungan antar kelompok kepentingan dalam struktur internasional. Adanya organisasi-organisasi non-pemerintah akan menstimulasi hubungan-hubungan baru dengan organisasi serupa sehingga akan berdampak terhadap internasionalisasi kebijakan domestik.⁷²

3. Meningkatnya Hubungan Dependensi dan Interdependensi Antar Negara

Adanya ketergantungan atau yang biasa disebut dependensi serta interdependensi tidak boleh dikesampingkan dalam mengkaji dampak hubungan transnasional. Negara-negara kecil akan dapat menentukan arah kebijakan dengan mempertimbangkan untung-rugi bagi negara mereka. Di sisi lain, negara yang memiliki power harus memikirkan kebijakan mereka serta konsekuensi yang ditimbulkan terhadap sistem hubungan transnasional. Dependensi dan interdependensi menimbulkan ketergantungan suatu negara terhadap kekuatan yang tidak dapat mereka kontrol sendiri.⁷³

4. Meningkatnya Kemampuan Suatu Negara Untuk Mempengaruhi Negara Lain

⁷¹ *Ibid*, hal. 554

⁷² *Ibid*, hal. 555

⁷³ *Ibid*, hal. 555-556

Kemampuan pemerintah yang meningkat untuk memberikan kontrol atas aktor lain, tidak jarang diikuti oleh agenda terselubung yang ingin dicapai. Ditambah dengan semakin tergantungnya suatu negara terhadap negara lain maka semakin mudah bagi pemerintah tertentu untuk memperluas pengaruhnya.⁷⁴

5. Munculnya *Autonomous Actor* Dalam Menentukan Kebijakan Luar Negeri
Yaitu munculnya aktor-aktor semacam organisasi transnasional, serikat buruh, perusahaan multinasional dan sebagainya. Keberadaan mereka juga memberikan pengaruh terhadap institusi maupun pergerakan lain yang lebih besar.⁷⁵

Perbedaan geografis, sumber daya, teknologi dan hal lainnya, membuat setiap negara di dunia ini tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Untuk itu diperlukannya bagi suatu negara menjalin kerjasama dengan pihak lain, karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Dalam melihat suatu keterkaitan hubungan antar negara dalam sebuah Organisasi Internasional/Lembaga Internasional sangatlah erat bila menggunakan teori kerjasama internasional dalam penelitian ini.

1.7.2 Ketahanan Energi (*Energy Security*)

Isu mengenai ketahanan energi (*energy security*) mulai dibahas pada perang dunia pertama. Saat itu, Winston Churchill membuat keputusan bersejarah dengan menggeser sumber kekuatan kapal Angkatan Laut Inggris dari batu bara

⁷⁴ *Ibid*, hal. 557-558

⁷⁵ *Ibid*

ke minyak.⁷⁶ Hal tersebut dimaksudkan untuk menandingi kecepatan armada musuh pada saat itu yakni Jerman. Akan tetapi, melalui keputusan tersebut mengartikan bahwa *The Royal Navy* Inggris tidak lagi bergantung pada sumber pasokan batu bara yang di produksi dalam negeri, melainkan akan bergantung pada pasokan minyak yang berasal dari Persia. Sejak keputusan Churchill tersebut, pertanyaan mengenai ketahanan energi mulai menjadi hal krusial yang berulang kali muncul sebagai isu penting yang memengaruhi strategi nasional maupun sistem internasional.⁷⁷

Menurut Daniel Yergin, ketahanan energi (*energy security*) merupakan sebuah konsep dimana sebuah negara mampu mempertahankan diri dan melakukan pembangunan dengan mengutamakan keamanan dan ketersediaan cadangan energi yang memadai dengan harga yang terjangkau, baik minyak ataupun variasi jenis energi lainnya. Hal ini semakin penting dengan kenyataan bahwa dinamika ekonomi dan politik turut mempengaruhi suplai energi yang sangat krusial bagi kegiatan pembangunan sebuah negara.⁷⁸

Hal-hal yang mempengaruhi keberlanjutan cadangan energi antara lain adalah ketersediaan cadangan energi, fluktuasi harga, ancaman terorisme, instabilitas domestik negara pengekspor energi, adanya perang, persaingan geopolitik, hingga peta energi oleh negara-negara besar pengonsumsi energi dunia.⁷⁹

⁷⁶ Daniel Yergin, "Ensuring Energy Security", *foreign affairs*, Vol. 85 No. 2, (March/April 2006), hal. 69

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*, Hal. 70

⁷⁹ *Ibid*

Daniel Yergin mendefinisikan ketahanan energi dengan mengklasifikasikan negara pengekspor dan negara pengimpor energi:⁸⁰

Untuk negara pengekspor energi, ketahanan energi dapat diartikan sebagai bagaimana cara mengamankan pasokan energi mereka untuk menjamin pendapatan finansial sehingga keberlangsungan negara dapat terjamin. Negara pengimpor, diklasifikasikan lagi menjadi negara negara maju dan negara berkembang. Untuk negara maju ketahanan energi dapat terjamin melalui diversifikasi energi, trading dan investasi di wilayah penghasil energi. Sementara untuk negara berkembang ketahanan energi didefinisikan sebagai bagaimana cara mencari penyelesaian untuk menyikapi perubahan energi yang dapat berdampak pada perekonomian negara.

Indonesia yang sedang menghadapi keterbatasan ketersediaan energi (*scarcity of energy supplies*) dapat diklasifikasikan ke dalam negara berkembang, dimana pertumbuhan penggunaan energi fosil semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama perubahan status Indonesia dari negara pengekspor minyak menjadi negara pengimpor minyak akibat tingginya laju permintaan akan energi fosil terutama minyak bumi, kedua naik turunnya harga minyak bumi di pasar internasional yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi negara seperti Indonesia, ketiga adanya ketimpangan di sektor pertambangan minyak Indonesia, dimana hasil produksi minyak bumi dari blok tambang yang dikelola oleh negara tidak dapat memenuhi kuota energi dalam negeri, sehingga impor menjadi sebuah keharusan dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia.

Sejalan dengan definisi dari Daniel Yergin, Indonesia sebagai negara berkembang harus mencari sebuah solusi ataupun alternatif-alternatif lain dalam menghadapi perubahan energi yang akan berdampak pada ekonomi negara. Melihat hal ini Indonesia mengambil sikap untuk memenuhi pasokan energinya

⁸⁰ Jumina dan Karna Wijaya, "Ketahanan Energi dan Kebijakan BBM di Indonesia", *ugm.ac.id*, 4 April 2012, <http://pse.ugm.ac.id/?p=413>, (diakses 1 Mei 2016)

dengan mulai menggarap energi-energi alternatif yang potensinya cukup besar. Indonesia mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bauran energi nasional untuk memenuhi kebutuhan domestiknya terhadap energi, sehingga energi dalam negeri dapat terus tersedia serta terjangkau oleh masyarakatnya, juga menghasilkan ketahanan dalam bidang energi. Secara umum ketahanan energi merupakan sebuah kondisi dimana energi dapat tersedia secara terus menerus dan dapat dijangkau dengan harga yang murah.

Ketersediaan suplai energi menjadi masalah yang cukup signifikan dalam hal ini. Pertama, jika suplai energi menurun, maka akan menimbulkan kenaikan harga energi yang berakibat pada turunnya daya beli energi. Hal ini akan berimbas pada kolapsnya kegiatan ekonomi dan bersifat destruktif terhadap kegiatan produksi dan konsumsi energi masyarakat. Kedua, dengan ditemukannya sumber suplai energi baru, maka hal ini dapat menunda kelangkaan energi yang mungkin terjadi dan mengamankan cadangan energi dalam kurun waktu tertentu. Suplai memegang peranan yang sangat penting, karena permintaan akan energi sebagai komoditas primer cenderung selalu tetap dan bersifat inelastis.⁸¹

Daniel Yergin membagi konsep *energy security* atas dua dimensi, yang pertama yaitu dimensi keindependenan, dimana suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energinya yang berasal dari sumber daya energi domestik, yang kedua, dimensi interdependensi global, dimana pemenuhan energi setiap negara tak lepas dari pasokan energi dunia yang berasal dari khususnya, negara-negara pengeksport yang kaya akan sumber minyak dan gas. Melalui dua dimensi ini, nampak bahwa *energy security* tidak semata merupakan isu domestik suatu negara

⁸¹Florian Baumann, "Energy Security as Multidimensional Concept", *CAP policy analysis* no. 1 (March 2008).

tetapi meliputi isu global dimana ketiadaan pasokan energi dapat berimplikasi pada stabilitas internasional, baik itu bidang ekonomi dan perdagangan maupun politik dan sosial.⁸²

Lebih lanjut, Daniel Yergin dalam jurnal *Ensuring Energy Security*, menjelaskan mengenai interdependensi dalam ketahanan energi:⁸³

In a world of increasing interdependence, energy security will depend much on how countries manage their relations with one another, whether bilaterally or within multilateral frameworks. And that requires looking not only around the corner, but also beyond the ups and downs of cycles to both the reality of an ever more complex and integrated global energy system and the relations among the countries that participate in it.

Artinya, pada lingkup global, meningkatnya saling ketergantungan dalam ketahanan energi, akan terlihat pada seberapa banyak dan bagaimana negara-negara mengelola hubungan mereka satu sama lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Tidak hanya dari satu permasalahan, tapi diperlukan perhatian atau pandangan yang menyeluruh dalam melihat sistem energi global yang semakin kompleks dan terintegrasi, juga hubungan antara negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya.

Ketahanan energi mulai menjadi isu global ketika Arab Saudi menghentikan ekspor minyak mentahnya ke negara-negara industri pada awal dekade 70-an. Pada era tersebut, minyak merupakan sumber energi yang paling vital bagi negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat, sedangkan Arab Saudi merupakan eksportir utama. Tindakan sepihak Arab Saudi tersebut praktis mengganggu aktivitas perekonomian negara-negara importir minyak tersebut,

⁸² Daniel Yergin (Mallaby 2006) , *Whats Energy Security Really means?*, www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/07/02/AR2006070200675.html, (diakses tanggal 1 mei 2016).

⁸³ Daniel Yergin, "Ensuring Energy Security", hal. 82

yang waktu itu hanya bergantung pada minyak Saudi Arabia. Dunia internasional kemudian menjadi sadar terhadap pentingnya menjaga pasokan agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi dan satu produsen energi.⁸⁴

Ketahanan energi merupakan tujuan penting dari kebijakan energi di banyak negara di dunia. Uni Eropa memiliki tiga pilar kebijakan energi yaitu efisiensi, keberlanjutan dan keamanan ketersediaan energi.⁸⁵ Indonesia sendiri melalui Perpres No. 5 Tahun 2006, Kebijakan Energi Nasional (KEN) Indonesia mulai mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan mengembangkan energi terbarukan sebagai bauran energi (*energy mix*).⁸⁶

Definisi *energy security* sendiri telah mengalami perubahan sesuai berjalannya waktu. Di periode pasca *oil shock* di 1970-an, definisi dari *energy security* berhubungan dengan penghindaran resiko atas gangguan potensial persediaan minyak dari pasokan minyak mentah di timur tengah. Di abad ini, faktor lain yang dapat mempengaruhi stabilitas persediaan bahan bakar dan meningkatkan harga minyak turut ditambahkan ketika menelaah *energy security*. Faktor faktor ini termasuk konflik politik, bencana alam, hal terkait terorisme, dan tantangan energi yang berhubungan dengan lingkungan.

Menurut laporan APERC (*Asia Pacific Energy Reseach Centre*), Ketahanan energi (*energy security*) merupakan kemampuan atas suatu ekonomi untuk menjamin ketersediaan sumber persediaan energi dalam keadaan yang berkelanjutan dengan harga energi yang berada pada suatu level yang tidak akan

⁸⁴ Daniel Yergin, "Ensuring Energy Security", hal. 75

⁸⁵ EU Commission, "Green Paper-A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy", *Commission of the European Communities* (2006), hal. 3

⁸⁶ Kementerian ESDM, "Dewan Energi Nasional Rubah Komposisi Bauran Energi Nasional", *esdm.go.id*, 25 Juni 2010, <http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/3516-dewan-energi-nasional-rubah-komposisi-bauran-energi-nasional.html>, (diakses 15 Maret 2016).

berefek buruk terhadap penyelenggaraan ekonomi.⁸⁷ Jadi, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi “keamanan” dari persediaan energi, seperti :

- a) Ketersediaan dari cadangan bahan bakar, baik secara domestik maupun secara eksternal.
- b) Kemampuan sebuah ekonomi untuk mendapatkan persediaan yang dapat memenuhi permintaan energi.
- c) Level dari sebuah diversifikasi sumber ekonomi energi dan diversifikasi penyedia minyak.
- d) Akses akan sumber bahan bakar, dalam hal ketersediaan yang berhubungan dengan infrastruktur energi dan infrastruktur transportasi energi.
- e) Hal geopolitik yang mempengaruhi perolehan sumber.⁸⁸

Pembahasan mengenai masalah ketahanan energi tidak pernah terlepas dari *national security* atau keamanan nasional. Di dalam bukunya, Barry Buzan mencantumkan beberapa definisi tentang *national security* atau keamanan nasional. Penelope Hartland Thumberg mendefinisikan keamanan nasional sebagai berikut, “[*National security is*] the ability of a nation to pursue successfully its national interests, as it sees them, any place in the world.”⁸⁹ Yang artinya keamanan nasional adalah kemampuan sebuah bangsa untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan sukses, sebagaimana bangsa tersebut melihat kepentingannya dimanapun di dunia ini.

⁸⁷ Asia Pasific Energy Research Centre, “A Quest For Energy Security In The 21st Century”, *APEREC*, Japan, (2007), hal. 6

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Barry Buzan, *People, States, and Fear : An Agenda for International Security Studies in The Past Cold War Era*, 2nd ed, (London: Harvester Wheatsheaf, 1991), hal.16

Sementara menurut Michael H.H. Louw: “Keamanan nasional mencakup kebijakan pertahanan tradisional dan juga tindakan-tindakan non-militer sebuah negara untuk memastikan kapasitas totalnya untuk survive sebagai sebuah entitas politik dalam rangka mengeluarkan pengaruhnya dan untuk melaksanakan interval pengaruh tersebut dan tujuan-tujuan internasionalnya.”⁹⁰

Barry Buzan menegaskan bahwa:⁹¹

In the case of security, the discussion is about the pursuit of freedom from threat. When this discussion is in the context of the international system, security is about the ability of states and societies to maintain their independent identity and their functional integrity. In seeking security, state and society are sometimes in harmony with each other, sometimes opposed. Its bottom line is about survival, but it also reasonably includes a substantial range of concerns about the conditions of existence.

Hal ini menunjukkan bahwa keamanan adalah pencarian akan kebebasan dari *threat* (ancaman). Pokok masalahnya adalah *survival* (kemampuan untuk bertahan hidup). Masalah keamanan nasional ini sangat terkait pula dengan masalah *national insecurity* sebuah negara, yang dapat disebabkan oleh kombinasi *threat* dan *vulnerability* (kerentanan). *Threat* sendiri adalah ancaman terhadap *national security* yang berasal dari luar negara tersebut sedangkan *vulnerability* adalah kerentanan yang juga berbahaya bagi keamanan nasional yang berasal dari dalam negara tersebut.⁹²

Terdapat berbagai macam tipe ancaman dan sesuai dengan situasi keamanan nasional tersebut, ancaman juga datang dari berbagai sektor mulai dari sektor militer, ekonomi, sosial dan ekologi. Meskipun ancaman yang datang dari masalah ketahanan energi tidak disebutkan oleh Buzan, namun ancaman tersebut

⁹⁰ *Ibid*, hal.16-17

⁹¹ *Ibid*, hal.18-19

⁹² *Ibid*, hal.112-116

dapat dikategorikan sebagai bagian dari ancaman di bidang ekonomi, mengingat bahwa ketahanan energi adalah bagian dari keamanan ekonomi.⁹³

Ancaman dari bidang ekonomi adalah ancaman yang paling sulit untuk diatasi dalam kerangka keamanan nasional. Hal ini disebabkan karena ide tentang *economic security* sendiri adalah adanya resiko, kompetisi yang agresif dan ketidakpastian terutama di dalam ekonomi pasar sehingga tidak semua hal bisa dianggap sebagai ancaman di dalam *economic security*. Masalah sumber daya seperti energi juga merupakan salah satu masalah ekonomi yang agak sulit dianggap sebagai ancaman, terutama jika dihubungkan dengan prinsip ekonomi pasar dengan *comparative advantage*.⁹⁴ Namun jika *strategic materials*, seperti energi harus diperoleh dari luar suatu negara, maka ancaman terhadap *security supply* dapat dikategorikan sebagai isu keamanan nasional.⁹⁵

Keamanan pasokan energi semakin penting, oleh karena itu Indonesia mulai mengurangi penggunaan minyak yang cadangannya mulai menipis. Pemerintah mendorong pengembangan EBT, juga pemanfaatan energi fosil yang cadangannya lebih besar seperti batubara dalam bauran energi nasional, hal ini dilakukan untuk menjaga keberagaman energi itu sendiri, upaya ini disebut diversifikasi energi. Diversifikasi energi adalah penganekaragaman penyediaan dan pemanfaatan berbagai sumber energi dalam rangka optimasi penyediaan energi.⁹⁶

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity*, 2nd Edition, (New Jersey: Prentice Hall, 2001), hal.495

⁹⁵ Barry Buzan, *States, and Fear : An Agenda for International Security Studies in ThePast Cold War Era*, hal. 123-126

⁹⁶ Kementerian ESDM, "Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006", [esdm.go.id, http://psdg.bgl.esdm.go.id/kepmen_pp_uu/perpres%20no5%20tahun%202006.pdf](http://psdg.bgl.esdm.go.id/kepmen_pp_uu/perpres%20no5%20tahun%202006.pdf). (diakses 3 Maret 2017)

Daniel Yergin menjelaskan tentang pentingnya diversifikasi energi, dalam jurnal *Ensuring Energy Security*.⁹⁷

Diversification will remain the fundamental starting principle of energy security for both oil and gas. Today, however, it will likely also require developing a new generation of nuclear power and clean coal technologies and encouraging a growing role for a variety of renewable energy sources as they become more competitive. It will also require investing in new technologies, ranging from near-term ones, such as the conversion of natural gas into a liquid fuel, to ones that are still in the lab, such as the biological engineering of energy supplies. Investment in technology all along the energy spectrum is surging today, and this will have a positive effect not only on the future energy picture but also on the environment.

Artinya, diversifikasi yang dilakukan pada dasarnya untuk menjaga ketahanan energi minyak dan gas yang mulai menipis, yang berarti juga mengurangi ketergantungan terhadap kedua energi tak terbarukan tersebut. Untuk itu, pada saat sekarang ini diperlukan pengembangan generasi baru dari energi nuklir dan teknologi batubara bersih, yang dapat mendorong peran dari sumber energi baru sehingga lebih kompetitif. Hal ini akan memberikan efek positif tidak hanya pada gambaran energi di masa depan, tetapi juga pada lingkungan.

Ketahanan energi akan terhalang ketika pasokan energi berkurang atau terganggu di beberapa tempat hingga menyebabkan suatu kenaikan harga yang tiba-tiba dan signifikan. Keamanan pasokan energi merupakan hal yang paling fundamental untuk mempertahankan kesinambungan pembangunan ekonomi. Kapasitas energi yang terbatas akan berdampak pada potensi produksi yang pada gilirannya dapat menjadi penghalang di dalam menopang pembangunan ekonomi jangka panjang.⁹⁸

⁹⁷ Daniel Yergin, "Ensuring Energy Security", hal. 82

⁹⁸ Maxensius TS, "Ketahanan Energi nasional dan reformasi Sektor Transportasi", *bappenas.go.id*, 13 Maret 2007, <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F31177/Ketahanan%20energi%20nasional-BI.htm>, (diakses 23 Juni 2016)

APEREC mendesain indikator keamanan pasokan energi (*security supply of energy*) bagi suatu negara yaitu:⁹⁹

- a) Diversifikasi dari permintaan energi primer (Diversification of Primary Energy Demand)

Dalam indikator ini, jika suatu perekonomian bergantung hanya pada satu sumber energi maka itu berarti negara tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap keamanan pasokan energi. Sebaliknya jika perekonomian suatu negara menggunakan sumber energi yang bervariasi dan rata terbagi maka negara tersebut memiliki resiko yang sedikit terhadap keamanan pasokan energi.

- b) Kertengantungan import energi (di timbang dari intensitas konsumsi sumber energi primer)

Jika perekonomian suatu negara memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap impor energi maka resiko akan keamanan pasokan energinya juga akan tinggi.

- c) Portofolio bahan bakar non karbon

Indikator ini mengukur usaha suatu perekonomian untuk berpindah dari portofolio bahan bakar karbon. Bahan bakar karbon (fosil) adalah sumber energi yang tidak dapat terbaharui dan suatu waktu dapat habis terpakai. Perpindahan ke bahan bakar non karbon di perlukan untuk menjaga agar sumber energi tidak mudah terganggu.

- d) Ketergantungan import minyak (di timbang dari intensitas konsumsi minyak sebagai sumber energi primer)

⁹⁹ Asia Pasific Energy Research Centre, "A Quest For Energy Security In The 21st Century", hal. 43

Indikator ini melihat ekspor dan impor minyak suatu negara yang dipengaruhi oleh konsumsi minyak sebagai sumber energi primer.

e) Ketergantungan import minyak dari Timur Tengah

Tingkat Ketergantungan suatu negara akan pasokan minyak dari Timur Tengah berpengaruh terhadap tingkat resiko keamanan pasokan energi. Semakin tinggi ketergantungan yang terjadi, maka risikonya pun akan semakin besar.¹⁰⁰

1.7.3 Kepentingan Nasional

Setiap negara memiliki suatu kepentingan nasional (*national interest*) untuk memajukan negaranya serta mewujudkan kesejahteraan warganya. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (*Security*) dan kesejahteraan (*Prosperity*). Mengenai kepentingan nasional, Daniel S. Papp mengatakan bahwa, “kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Dalam hal ini faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang di ambil oleh suatu negara adalah untuk meningkatkan perekonomian bersama.”¹⁰¹

Dalam kerjasama Indonesia – IEA terhadap optimalisasi *energy mix*, kepentingan nasional Indonesia terletak dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni, menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal yang dimaksud dengan menjamin kesejahteraan masyarakat yaitu masyarakat mampu atau dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ D. S. Papp, *Contemporary International Relation: A Framework for Understanding*, Second Editions (New York: MacMillan Publishing Company, 1988), hal. 29

ketersediaan barang serta harga yang terjangkau, seperti pangan dan ketersediaan energi. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bauran energi (*energy mix*) nasional, dinilai sebagai salah satu langkah yang baik dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Hal ini dapat memberikan gambaran yang baik bagi ketersediaan energi Indonesia di masa depan.

Menurut Norman J. Padelford, kepentingan nasional adalah, “*National interest of a country is what a governmental leaders and in large degree also what its people consider at any time to be vital to their national independence, way of life, territorial security and economic welfare.*”¹⁰²

Pendapat diatas mengemukakan esensi bahwa baik diplomasi maupun perang merupakan wahana politik luar negeri yang paling lazim digunakan sebuah negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional sama dengan kepentingan masyarakat, tetapi pemerintah yang kemudian diberikan kewenangan sebagai perwakilan jutaan rakyat untuk bertanggungjawab merumuskan hingga memperjuangkan kepentingan tersebut baik melalui kebijakan dalam negeri maupun luar negeri.¹⁰³

Miroslav Nincic menyebutkan tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam mendefinisikan kepentingan nasional.¹⁰⁴ Pertama, kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat. Kedua kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional. Artinya pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan

¹⁰² Norman J. Padelford and George A. Lincoln, *International Politics*, (New York: The Macmillan Company, 1960), hal. 309

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 67

internasional. Ketiga kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok atau lembaga pemerintahan sehingga menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan.¹⁰⁵ Penelitian ini memfokuskan kajian dalam kerjasama di bidang energi, dimana energi merupakan unsur vital yang harus diamankan oleh suatu negara demi keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Melihat hal ini, mengamankan energi tentu merupakan salah satu agenda kepentingan nasional suatu negara

Demi mewujudkan kepentingan nasional ini, setiap negara harus mampu untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai hal yang dapat mengancam keberlangsungan hidup maupun kebutuhan rakyatnya. Hal ini ditekankan oleh Mochtar Mas'ood bahwa kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik dan budayanya dari gangguan-gangguan negara lain.¹⁰⁶

Setiap negara bangsa tidak bisa menghindari dari konsep kepentingan nasional karena kepentingan nasional tersebut berkaitan erat dengan tujuan-tujuan nasional.¹⁰⁷ Indonesia sebagai negara, memiliki tujuan yang hampir sama negara lain yaitu memberi manfaat sebanyak-banyaknya atas sumber daya yang dimiliki untuk mensejahterakan rakyatnya. Tujuan ini sejalan dengan konsep kerjasama internasional dan konsep *energy security* karena sama-sama mengedepankan kesejahteraan rakyat. Negara sebagai entitas politik harus mampu menjalankan tujuan itu disaat bekerjasama dengan IEA, IEA pun diharapkan mampu membantu Indonesia, dalam mengatasi tantangan dan permasalahan energi.

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Ilmu dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 141

¹⁰⁷ R. Suprpto, *Hubungan internasional: sistem interaksi, dan perilaku*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal.147

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif, dimana peneliti berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan kondisi adanya.¹⁰⁸ Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai suatu pendekatan untuk menjelajahi dan memahami makna dalam fenomena sosial yang diteliti.¹⁰⁹ Disamping itu, tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang komprehensif mengenai kejadian spesifik yang dialami oleh individu maupun suatu kelompok.¹¹⁰ Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dalam melihat pengaruh kerjasama Indonesia – IEA terhadap optimalisasi *energy mix* di Indonesia.

1.8.1 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dari apa yang telah dirumuskan di rumusan masalah, maka peneliti memfokuskan penelitian pada pengaruh kerjasama Indonesia – IEA terhadap kebijakan ketahanan energi Indonesia. Sedangkan untuk batasan tahunnya, peneliti membatasi penelitian ini mulai tahun 2006 sampai tahun 2016. Peneliti mengambil batasan tahun tersebut, karena pada tahun 2006 itulah dialog tentang kerjasama antara Indonesia dengan IEA dimulai. Pada saat itu juga Indonesia telah menunjukkan respon positif untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang energi.

¹⁰⁸ John W. Best, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, disunting oleh Drs. Mulyadi Guntur Waseso dan Drs. Sanafiah Faisal, (Surabaya:Usaha Nasional, 1982), hal.82

¹⁰⁹ John W.Cresswell, *Fourth Edition Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Universitas Nebraska,Lincoln: Sage Publications, 2013), hal. 32

¹¹⁰ Vickie A. Lambert and Clinton E. Lambert, “Qualitative Descriptive Research : An Acceptable Design”, *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, Vol. 16 No. 4, (October - December 2012), hlm. 255

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Salah satu metode yang umum digunakan dalam mengumpulkan data penelitian kualitatif adalah melalui tinjauan dokumen berupa catatan dan arsip yang terdapat pada masyarakat, komunitas atau organisasi¹¹¹. Data dalam penelitian ini didapat melalui dokumen-dokumen resmi, berupa *agreements*, *press realesed*, yang berhubungan dengan fokus penelitian sebagai data primer, dan didukung oleh data sekunder berupa data penelitian terdahulu, analisis para ahli, *review*, *working paper*, serta artikel-artikel yang sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan, yang dimuat oleh media cetak maupun media online.

1.8.3 Tingkat Analisis

Sasaran analisis yang tepat harus memilih dari berbagai kemungkinan tingkat analisis. Maka dalam menentukan tingkat analisis, kita terlebih dahulu menetapkan unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis yaitu objek yang perilakunya yang hendak kita analisis dan jelaskan. Unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang akan digunakan.¹¹² Unit analisis dalam penelitian ini adalah negara yaitu Indonesia, dengan unit eksplanasinya adalah kerjasama Indonesia – IEA. Tingkat analisis pada penelitian ini adalah pada negara yakni Indonesia.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data secara umum bisa diartikan sebagai proses pengelompokan dan penginterpretasian data yang telah dikumpulkan. Analisis data kualitatif

¹¹¹ Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman, “*Designing Qualitative Research 3e*”, (California: Sage Publications Inc, 1999), hal. 117

¹¹² Mochtar Mas’oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 35-39.

adalah identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.¹¹³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisa data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap :¹¹⁴

1. Reduksi data (data reduction)

Yang terdiri dari proses organisasi data dan ketegorisasi data dengan konsep dimana data akan disusun secara sistematis.

2. Penyajian data (data display)

Proses menghubungkan data dengan kerangka konseptual yang digunakan

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification)

Terdiri dari proses evaluasi dan melaporkan hasil temuan.

Pada tahap teknik analisis ini akan dimulai dengan mengumpulkan data – data mengenai energi Indonesia, yang mencakup permasalahan/tantangan, kebijakan, energi fosil dan energi terbarukan. Kemudian mengumpulkan data-data kerjasama Indonesia – IEA dalam mengatasi permasalahan ketahanan energi, terutama dalam optimalisasi bauran energi (*energy mix*). Setelah itu untuk menjelaskan bagaimana pengaruh kerjasama Indonesia – IEA terhadap optimalisasi *energy mix* di Indonesia, peneliti akan menggunakan konsep kerjasama internasional dari Keohane dan Nye.

¹¹³ Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman, hlm.150

¹¹⁴ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Sage Publications : 1994), hal. 18

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II *Permasalahan Energi Indonesia*

Bab ini menjelaskan mengenai permasalahan energi Indonesia, yang dalam pemaparannya diawali dengan permasalahan energi secara umum, dilanjutkan dengan permasalahan yang berkaitan optimalisasi *energy mix*, kemudian menjelaskan arah Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan hambatan dalam penerapan kebijakan energi.

BAB III *Kerjasama Indonesia – International Energy Agency (IEA)*

Bab ini akan menjelaskan mengenai kerjasama Indonesia - IEA. Dimulai dengan pengenalan profil IEA, lalu menjelaskan gambaran umum kerjasama Indonesia - IEA, bagaimana posisi dan partisipasi Indonesia dalam IEA, serta memaparkan program kerjasama KESDM Indonesia – IEA.

BAB IV *Pengaruh Kerjasama Indonesia – IEA Terhadap Optimalisasi Energy Mix Di Indonesia*

Bab ini menjelaskan pengaruh kerjasama Indonesia – IEA terhadap optimalisasi *energy mix* di Indonesia, dengan menggunakan teori kerjasama internasional dari Keohane dan Nye.

BAB V *Kesimpulan dan Saran*

Bab ini menyediakan kesimpulan dan saran dari penelitian yang sesuai dengan pertanyaan penelitian.